



BSN



Laporan Kinerja 2016

Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu

**Pusat Sistem Penerapan Standar
Badan Standardisasi Nasional**

Laporan Kinerja 2016
Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu
Pusat Sistem Penerapan Standar - Badan Standardisasi Nasional

Gedung I BPPT, Lantai 10
Jl. MH. Thamrin, No. 8, Jakarta Pusat

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu PPSJM Tahun 2016 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan Pusat Sistem Penerapan Standar (PSPS) Tahun 2016.

Untuk melampaikan Capaian Bidang PPSJM PSPS atas sasaran strategis berdasarkan *internal Process Perspectives* sebagai berikut:

- 1) Capaian untuk indikator “Persentase jumlah industri/ organisasi yang siap disertifikasi dari jumlah industri yang difasilitasi sebesar “95.7%.
- 2) Capaian untuk indikator “Jumlah penyelenggaraan penghargaan kepada industri/organisasi penerap SNI” sebesar 100%.
- 3) Capaian untuk indikator “Jumlah kebijakan penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian” sebesar 100%
- 4) Capaian untuk indikator “Jumlah LPK yang siap diakreditasi” sebesar 84%

Capaian realisasi 2016 untuk butir 1 dan 4 tidak memenuhi 100% target yang ditetapkan, disebabkan adanya kebijakan pemerintah mengenai penghematan dan efisiensi anggaran TA 2016 sehingga dilakukan pengurangan jumlah LPK yang dibimbing dan kegiatan workshps peningkatan kemampuan LPK di wilayah. . Kendala-kendala tersebut dapat diantisipasi dengan optimalisasi penggunaan anggaran dengan cara kerjasama (*partnership, cost sharing*) dengan stakeholder dalam pembimbingan organisasi maupun LPK, dan sistem tata kerja yang lebih baik.

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu (PPSSJM) - Pusat Sistem Penerapan Standar Tahun 2016, disusun guna memenuhi kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2016 periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015- 2019, Bidang PPSSJM merupakan salah satu bidang yang berada di Pusat Sistem Penerapan Standar BSN bertekad melaksanakan Reformasi Birokrasi melalui penguatan kinerja pada Bidang PPSSJM. Penguatan kinerja dilakukan melalui pelaksanaan program kerja sesuai target yang ditetapkan untuk mencapai sasaran area perubahan dengan tingkat keyakinan yang memadai.

Laporan Kinerja Bidang PPSSJM Tahun 2016 ini, diharapkan menjadi input bagi pengambil keputusan untuk meningkatkan dan memperbaiki program dan kegiatan maupun kinerja Pusat Sistem Penerapan Standar di masa mendatang secara lebih optimal.

Jakarta, Januari 2017
Bidang Prasarana Penerapan Standar dan
Sistem Jaminan Mutu
Pusat Sistem Penerapan Standar

Badan Standardisasi Nasional

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Bab 1 Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Kelembagaan	3
D. Sumber Daya Manusia	4
E. Peran Strategis Pusat Sistem Penerapan Standar	6
Bab 2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	7
A. Perencanaan Strategis	7
B. Penetapan Kinerja	10
Bab 3 Akuntabilitas Kinerja	12
A. Capaian Kinerja Organisasi	12
B. Realisasi Anggaran	24
Bab 4 Penutup	25

Lampiran

Daftar Tabel

Tabel 1	Jumlah Pegawai Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu (Desember 2016)	4
Tabel 2	Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2015 - 2019	9
Tabel 3	Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Pencapaian Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu (PPSSJM) Tahun 2016	10
Tabel 4	Capaian Kinerja Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu Tahun 2016	12
Tabel 5	Target, Realisasi dan Capaian Indikator 3 Tahun 2016	14
Tabel 6	Target, Realisasi dan Capaian Indikator 4 Tahun 2016	16
Tabel 7	Target, Realisasi dan Capaian Indikator 5 Tahun 2016	18
Tabel 8	Target, Realisasi dan Capaian Indikator 8 Tahun 2016	20
Tabel 9	Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja 8 Tahun 2015-2016	20
Tabel 10	Target, Realisasi dan Capaian Indikator 9 Tahun 2016	21
Tabel 11	Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja 9 Tahun 2015-2016	22

**Daftar
Gambar**

Gambar 1 Grafik Klasifikasi Pegawai Bidang PPSSJM (Desember 2016) 5

Bab 1

Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) merupakan syarat mutlak bagi setiap penyelenggara negara untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Dalam upaya mewujudkan *good governance* tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari KKN.

Pusat Sistem Penerapan Standar - Badan Standardisasi Nasional yang berada di bawah Kedeputan Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang sistem pemberlakuan standar dan penanganan pengaduan serta pembinaan prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu. Dalam melaksanakan tugasnya, PSPS didukung oleh 2 (dua) Bidang yaitu Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu (PPSSJM), dan Bidang Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan. Dalam pelaksanaannya PSPS berpegang pada ada perencanaan strategis Kedeputan PSA yang dalam pendekatannya dilakukan melalui pencermatan lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal, serta mengacu kepada pencapaian perencanaan strategis BSN.

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi PSPS, Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu (PPSSJM) sebagai bagian dari unit kerja PSPS bertugas untuk melakukan penyiapan prasarana, memberikan bimbingan kepada organisasi termasuk Usaha Mikro Kecil untuk menerapkan standar SNI, pengembangan sistem jaminan mutu, dan melakukan penilaian kepada organisasi penerap standar yang berkinerja .baik. Oleh karena itu, kegiatan yang dilakukan oleh Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu (PPSSJM) Tahun 2016 memiliki fokus pada pengembangan kompetensi LPK, peningkatan jumlah organisasi yang menerapkan SNI disektor strategis, seperti: pasar rakyat, pelayanan publik, dan UMK. Selain itu, bidang PPSSJM juga menyelenggarakan SNI Award sebagai bentuk apresiasi nasional kepada organisasi yang secara konsisten mampu menerapkan SNI.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan oleh PSPS bidang Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu (PPSSJM), dengan tujuan, sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit Kerja.

C. KELEMBAGAAN

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional No. 965/BSN-1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BSN No. 4 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala BSN No. 965/BSN/HL.35/05/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN, Pusat Sistem Penerapan Standar mempunyai tugas pokok:

“Melaksanakan melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang sistem pemberlakuan standar dan penanganan pengaduan serta pembinaan prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu”

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, maka Pusat Sistem Penerapan Standar menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan rumusan kebijakan di bidang sistem pemberlakuan standar dan penanganan pengaduan serta prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu;
- b. Pembinaan dan koordinasi program pemberlakuan standar dan penanganan pengaduan serta prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu;
- c. Pelaksanaan urusan sistem pemberlakuan standar dan penanganan pengaduan;
- d. Pelaksanaan urusan sistem prasarana penerapan standar dan jaminan mutu;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sistem pemberlakuan standar, penanganan pengaduan serta prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu.

Tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan Unit Kerja Eselon III yang berada di bawah Pusat Sistem Penerapan Standar, yaitu sebagai berikut:

1. Bidang Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan
2. Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu (PPSSJM)

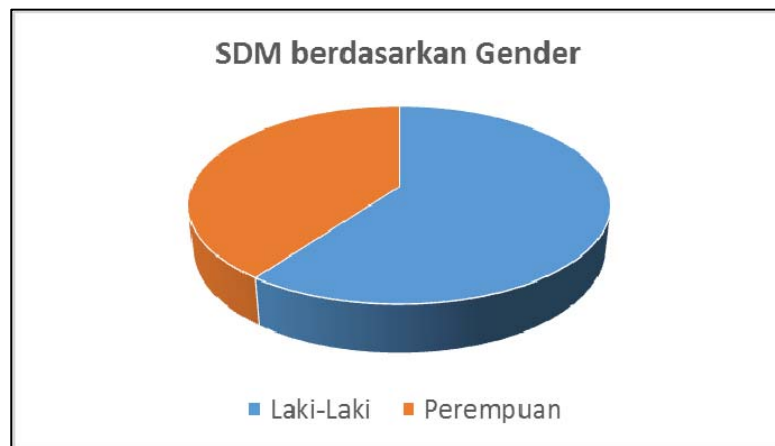
Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Jaminan Mutu (PPSSJM) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur, program dan perencanaan serta melaksanakan kegiatan penyusunan, inventarisasi, pemantauan dan evaluasi sistem prasarana penerapan standar dan jaminan mutu.

D. SUMBER DAYA MANUSIA

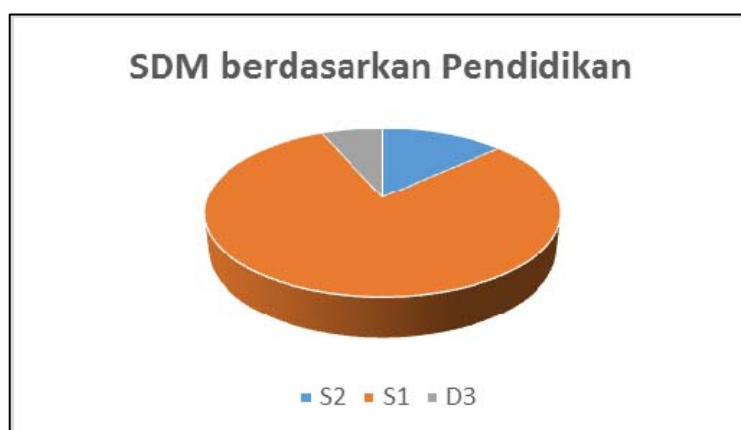
Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, Bidang PPSSJM memiliki personil sebanyak 15 orang PNS, dengan rincian sesuai Tabel 1 dan klasifikasi berdasarkan latar belakang pendidikan dan jenis kelamin sesuai Gambar 1 berikut.

Tabel 1: Jumlah Pegawai Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu (Desember 2016)

Unit Kerja	Jumlah PNS (orang)
Kepala Bidang	1
Subbidang Prasarana Penerapan Standar	5
Subbidang Sistem Jaminan Mutu	9
Jumlah	15



a) Gambar Grafik Jumlah SDM Bidang PPSSJM berdasarkan Gender



b) Gambar Grafik Jumlah SDM Bidang PPSSJM berdasarkan Pendidikan

Gambar 1: Grafik Klasifikasi Pegawai Bidang PPSSJM

Jumlah Sumber Daya Manusia bidang PPSSJM lebih didominasi oleh laki-laki dengan jumlah 9 (sembilan) orang dari total SDM sebanyak 15 orang. Sementara itu berdasarkan pendidikan, dari Gambar diatas diketahui latar belakang pendidikan S1 sebanyak 12 orang, disusul dengan latar belakang pendidikan S2 sebanyak 2 orang dan D3 sebanyak 1 orang. Program peningkatan kompetensi personil dilakukan dengan mengadakan pelatihan baik yang dilakukan secara internal maupun pengiriman peserta training, *capacity building*.

E. PERAN STRATEGIS PADA PUSAT SISTEM PENERAPAN STANDAR

Undang-Undang 20 Tahun 2014 menyebutkan bahwa SNI adalah suatu dokumen yang berisikan ketentuan teknis, pedoman dan karakteristik kegiatan atau produk yang berlaku secara nasional untuk membentuk keteraturan yang optimum dalam konteks keperluan tertentu. Bagi pelaku usaha, penerapan SNI akan memberikan kepastian tentang batas-batas ketentuan teknis yang sebaiknya dipenuhi sehingga dapat meningkatkan efisiensi produksi, level mutu, keamanan, dan kehandalan produk, sehingga pada akhirnya dapat memberi akses produk ke pasar yang lebih baik dan meningkatkan daya saing produk.

Penerapan SNI pada sistem dan produk nasional adalah upaya yang dapat ditempuh sebagai upaya meningkatkan daya saing produk nasional. Pengguna produk dan konsumen akhir akan mendapat kepastian dan jaminan tentang kualitas atau keamanan dari produk yang akan dibelinya, sementara kepentingan publik akan mendapat perlindungan yang mencakup kesehatan masyarakat, kelestarian lingkungan dan keselamatan negara.

Untuk mendukung kondisi tersebut, maka bidang PPSSJM pada PSPS melaksanakan kegiatan dengan tujuan untuk **meningkatkan kemampuan para pemangku kepentingan dalam menerapkan SNI**, dengan sasaran strategis **meningkatkan kapasitas dan kualitas organisasi penerapan standar**. Dalam implementasinya, kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyusunan rancangan kebijakan penerapan standar dan penilaian kesesuaian, peningkatan kompetensi Lembaga Penilaian Kesesuaian sebagai infrastruktur penerapan standar dan peningkatan kompetensi industri/organisasi dalam menerapkan standar.

Sinergitas pelaksanaan program tersebut dilakukan bersama dengan baik melibatkan regulator, masyarakat dan organisasi penerap standar sebagai pelaku usaha guna meningkatkan dan memperkuat daya saing produk dalam negeri sehingga mampu bersaing di pasar dalam negeri dan di pasar global.

Bab 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Visi

Visi Pusat Sistem Penerapan Standar tahun 2015-2019 adalah:

"Terwujudnya Sistem dan Kapasitas Infrastruktur Penerapan Standar yang Handal untuk Meningkatkan Daya Saing Produk dan Kualitas Hidup Bangsa"

Misi

Sejalan dengan visi tersebut di atas, maka misi Pusat Sistem Penerapan Standar adalah memberikan kontribusi nyata dalam melaksanakan kegiatan penerapan standar untuk mendukung pembangunan ekonomi yaitu:

1. Meningkatkan kemampuan lembaga penilaian kesesuaian dan organisasi/industri dalam menerapkan Standar Nasional Indonesia
2. Mengembangkan dan menguatkan sistem penilaian kesesuaian untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun untuk akses ke pasar internasional
3. Memfasilitasi pengoperasian layanan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian
4. Mengkoordinasi pengelolaan standar nasional untuk satuan ukuran guna memastikan ketertelusuran metrologi nasional ke sistem internasional
5. Meningkatkan kerjasama nasional, bilateral, regional dan internasional di bidang sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian.

Tujuan

Sesuai dengan visi, misi, tugas pokok, dan fungsi Pusat Sistem Penerapan Standar, serta dengan memperhatikan tujuan yang akan dicapai BSN untuk periode 2015-2019, maka tujuan yang akan dicapai Pusat Sistem Penerapan Standar adalah:

1. Meningkatkan pemanfaatan kebijakan dan skema penilaian kesesuaian oleh pemangku kepentingan
2. Meningkatkan kapabilitas Lembaga penilaian kesesuaian untuk mendukung kegiatan penilaian kesesuaian
3. Meningkatkan jumlah penerapan SNI oleh organisasi secara konsisten
4. Meningkatkan integritas penerapan tanda SNI

Sasaran strategis

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Pusat Sistem Penerapan Standar menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya penerapan SNI oleh Pemangku kepentingan
2. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian
3. Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumberdaya manusia, tata kelola dan organisasi PSPS yang profesional

Kebijakan

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, pada dasarnya arah kebijakan Pusat Sistem Penerapan Standar dapat dikelompokkan ke dalam 3 arah kebijakan yaitu:

1. Penguatan kebijakan dan skema penilaian kesesuaian dalam kegiatan penilaian kesesuaian.
2. Peningkatan kapabilitas LPK dan organisasi dalam menerapkan SNI.
3. Pemastian terpeliharanya integritas tanda SNI dalam melindungi kepentingan publik dan fungsi lingkungan hidup.

Perencanaan Pencapaian Sasaran strategis

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pusat Sistem Penerapan Standar yang telah ditetapkan, maka bidang PPSSJM pada PSPS sebagai bagian dari Unit Kerja di Pusat Sistem Penerapan Standar, sesuai dengan tugasnya menyiapkan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di sektor prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu, berperan dalam mencapai sasaran strategis “meningkatkan sistem dan infrastruktur penerapan SNI”

Target pencapaian sasaran strategis PSPS, indikator kinerja, dan target sampai dengan tahun 2019, dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

**Tabel 2: Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Pencapaian
Sasaran Strategis Tahun 2015 – 2019**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
		2015	2016	2017	2018	2019	satuan
Customer Perspectives							
1. Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku kepe- ntingan	1. Jumlah SNI yang diadopsi menjadi regulasi teknis (kumulatif)	198	203	208	213	218	SNI
	2. Jumlah SNI yang diterapkan sukarela oleh pelaku usaha/ organisasi	156	161	171	186	211	SNI
Internal Process Perspectives							
2. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem pene- rapan standar dan penilaian kesesuaian	3. Persentase jumlah industri/organisasi yang siap di serti- fikasi dari jumlah industri yang difasilitasi	6	14	30	46	61	%
	4. Jumlah penyelenggaraan penghargaan kepada industri / organisasi penerap SNI	1	2	3	4	5	Kegiatan
	5. Jumlah kebijakan penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian	4	8	12	16	20	Kebijakan
	6. Jumlah jenis produk yang dimonitor penerapan nya	5	10	15	20	25	Jenis produk
	7. Persentase penyelesaian penanganan pengaduan dalam penerapan standar	100	100	100	100	100	%
	8. Persentase jumlah LPK yang siap diakreditasi	42	52	61	71	79	%

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					satuan
		2015	2016	2017	2018	2019	
Learning and Growth Perspectives							
3. Meningkatnya kinerja system pengelolaan anggaran, sumber daya, manusia, tata kelola dan organisasi PSPS yang profesional	9. Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) PSPS yang meningkat kompetensinya	100	100	100	100	100	%
	10. Realisasi anggaran PSPS	>95	>95	>95	>95	>95	%
	11. Jumlah e-governance yang mendukung tata kelola PSPS	3	4	5	7	9	Aplikasi

Melalui tabel diatas dapat dilihat bahwa kontribusi bidang PPSSJM untuk mencapai indikator kinerja pada Pusat Sistem Penerapan Standar terkonsentrasi pada terwujudnya :

- sasaran ke-1 dengan indikator kinerja ke-2 yaitu Jumlah SNI yang diterapkan sukarela oleh pelaku usaha/ organisasi;
- sasaran ke-2 dengan indikator kinerja ke-3, 4, 5 dan 8; dan
- sasaran ke-3 untuk meningkatkan kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi PSPS yang profesional melalui peningkatan kerjasama, koordinasi dan konsolidasi baik antar dan internal bidang.

B. PENETAPAN KINERJA

Berdasarkan target pencapaian sasaran strategis PSPS tahun 2015-2019, penetapan kinerja PSPS tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Tabel 3: Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Pencapaian Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu (PPSSJM) Tahun 2016

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Customer Perspectives		
Internal Process Perspectives		
2 Meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian	1 Persentase jumlah industri/ organisasi yang siap disertifikasi dari jumlah industri yang difasilitasi	14 %
	2 Jumlah penyelenggaraan penghargaan kepada industri/organisasi penerap SNI	2 kegiatan
	3 Jumlah kebijakan penerapan standardisas dan penilaian kesesuaian	8 kebijakan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	4 Jumlah jenis produk yang dimonitor penerapannya	10 jenis produk
	5 Persentase penyelesaian penanganan pengaduan dalam penerapan standar	100 %
	6 Persentase jumlah LPK yang siap diakreditasi	52% %
Learning and Growth Perspectives		
3 Meningkatkan kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumberdaya manusia, tata kelola dan organisasi PSPS yang profesional	7 Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) PSPS yang meningkat kompetensinya	100 %
	8 Realisasi anggaran PSPS	95 %
	9 Jumlah <i>e-govemance</i> yang mendukung tata kelola PSPS	4 Aplikasi

Bab 3

Akuntabilitas Kinerja

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pencapaian kinerja adalah unjuk kerja dan prestasi kerja atau hasil kerja yang diwujudkan dalam melakukan kegiatan atau program untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Pencapaian target yang direncanakan PSPS dalam tahun 2016 sesuai dengan Penetapan Kinerja yang telah diuraikan pada Tabel 3 diatas, adalah sebagai berikut.

Tabel 4: Capaian Kinerja Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu Tahun 2016

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Pencapaian Target Tahun 2016		
		TARGET	REALISASI	%
Customer Perspectives				
1. Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku kepentingan	1 Jumlah SNI yang diadopsi menjadi regulasi teknis (kumulatif)	203 SNI	Bidang Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan	100%
	2 Jumlah SNI yang diterapkan sukarela oleh pelaku usaha / organisasi	161 SNI	Bidang Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan	100%
Internal Process Perspectives				
2. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian	3 Persentase jumlah industri/ organisasi yang siap disertifikasi dari jumlah industri yang difasilitasi	14 %	13,4 %	95,7 %
	4 Jumlah penyelenggaraan penghargaan kepada industri / organisasi penerap SNI	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
	5 Jumlah kebijakan penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian	2 kebijakan	2 kebijakan	100 %
	6 Jumlah jenis produk yang dimonitor penerapan nya	10 jenis produk	Bidang Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan	100 %

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Pencapaian Target Tahun 2016		
		TARGET	REALISASI	%
	7 Persentase penyelesaian penanganan pengaduan dalam penerapan standar	100 %	Bidang Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan	100%
	8 Persentase jumlah LPK yang siap diakreditasi	52 %	44 %	84 %
Learning and Growth Perspectives				
3. Meningkatnya kinerja kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumberdaya manusia, tata kelola dan organisasi PSPS yang profesional	9 Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) PSPS yang meningkat kompetensinya	100 %	100 %	100%
	10 Realisasi anggaran PSPS	95 %	98,3 %	103,4 %
	11 Jumlah <i>e-govemance</i> yang mendukung tata kelola PSPS	4 Aplikasi	4 aplikasi	100 %

Berdasarkan Tabel 4 di atas, berikut diuraikan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, yaitu: “Meningkatnya kapasitas dan kualitas penerapan standar”.

**Indikator
Kinerja 3****Jumlah industri/organisasi yang mendapat fasilitasi penerapan standar/SNI**

Salah satu upaya Pusat Sistem Penerapan Standardisasi dalam rangka menyelenggarakan fungsi peningkatan sistem prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu adalah dengan melakukan pembinaan industri/organisasi dalam menerapkan standar/SNI. Pada tahun 2016, peningkatan penerapan standar dilakukan kepada industri/organisasi yang mendapatkan pemahaman penerapan SNI melalui kegiatan bimbingan penerapan SNI di Organisasi/Industri dan bimbingan penerapan SNI untuk Lembaga Penilaian Kesesuaian.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kompetensi organisasi dalam menerapkan SNI, model insentif bagi organisasi/industri yang diberikan terdiri dari pelaksanaan workshop pemahaman SNI, bimbingan penerapan SNI hingga siap disertifikasi, dan peningkatan kompetensi melalui kegiatan SNI Award. Pada tahun 2016, jumlah industri/organisasi yang mendapat fasilitasi penerapan standar/SNI sebanyak 150 industri/organisasi. Meskipun tahun 2016 terdapat penghematan anggaran, beberapa bimbingan dilakukan dengan melakukan kolaborasi dan integrasi kegiatan bersama dengan unit kerja lainnya. Secara rinci kegiatan yang dilakukan meliputi:

- 70 (tujuh puluh) industri/organisasi yang telah mendapatkan bimbingan penerapan SNI, terdiri dari: sektor UMK sebanyak 62 (enam puluh dua) organisasi; unit pelayanan publik yang menerapkan sistem manajemen mutu sebanyak 2 (dua) organisasi; 7 (tujuh) pasar rakyat dan 1 (satu) organisasi sektor pertanian organik. Terkait bimbingan penerapan sistem manajemen mutu dan pasar rakyat, merupakan indaklanjut kerjasama BSN dengan Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga serta Yayasan Danamon Peduli.
- 40 (empat puluh) industri/organisasi yang mendapatkan kesempatan untuk evaluasi lapangan terkait penerapan SNI serta input untuk pengembangan penerapan SNI bagi organisasinya.

Melalui capaian tersebut terlihat bahwa jumlah industri/organisasi yang memiliki kapasitas untuk menerapkan standar/SNI semakin bertambah. Hal ini diharapkan dapat berdampak kepada peningkatan kinerja dan mutu organisasinya. Capaian realisasi untuk indikator ke-2 Tahun 2016 tentang persentase jumlah industri/ organisasi yang siap disertifikasi dari jumlah industri yang difasilitasi yaitu sebesar 13.4 % dari target yang ditetapkan, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5: Target, Realisasi dan Capaian Indikator 3 Tahun 2016

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase jumlah industri/ organisasi yang siap disertifikasi dari jumlah industri yang difasilitasi	14%	13.4%	95.7%

Pencapaian realisasi untuk indikator 3 sebesar 95.7% pada tahun 2016, kurang dari target yang telah ditetapkan disebabkan beberapa faktor, yaitu : adanya kebijakan pemerintah terkait penghematan dan efisiensi anggaran TA 2016 sehingga beberapa kegiatan pembimbingan organisasi yang telah diagendakan tidak dapat dijalankan, promosi yang mendorong keikutsertaan SNI Award juga terbatas, penundaan pelaksanaan kegiatan dikarenakan revisi APBN juga ikut menjadi faktor tidak terpenuhinya capaian sesuai target 2016 .

Maka di tahun 2017 pengembangan prasarana penerapan standar akan memulai pelaksanaan kegiatan lebih awal dan melaksanakan beberapa kegiatan pembimbingan penerapan standar di Organisasi dengan cara partnership bersama K/L, Pemda serta Organisasi lainnya.

Indikator Kinerja 4**Jumlah penyelenggaraan penghargaan kepada industri/ organisasi penerap SNI**

SNI diterapkan secara sukarela oleh organisasi/ pelaku usaha dan dapat diberlakukan secara wajib oleh pemerintah dalam bentuk regulasi teknis dengan pertimbangan bahwa standar tersebut berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan atau pelestarian lingkungan hidup. Penerapan SNI secara sukarela dapat menjadi indikator bahwa SNI telah menjadi faktor pasar atau menjadi salah satu pertimbangan konsumen dan produsen dalam melakukan transaksi.

Untuk mendorong makin luasnya pemanfaatan SNI, diperlukan kerjasama dan keterlibatan berbagai pihak dalam melakukan awareness, bimbingan dan pembinaan terhadap organisasi dan industri. Disudut lain diperlukan apresiasi khusus dari Pemerintah untuk menghargai para pelaku usaha dan organisasi yang telah bersungguh-sungguh berkonsentrasi untuk memenuhi harapan pelanggan dengan menghasilkan produk barang dan jasa yang bermutu.

Pemberian Penghargaan diberikan kepada organisasi dan industri yang menerapkan SNI secara konsisten dan berkesinambungan melalui serangkaian proses pelaksanaan penilaian SNI Award. Peserta SNI Award dapat menilai kinerja internalnya menggunakan kriteria SNI Award 2016 sesuai kategori organisasi (besar/menengah/kecil) yang telah ditetapkan. Diharapkan penghargaan SNI Award dapat meningkatkan kinerja dan daya saing organisasi sekaligus memperkuat daya saing nasional dalam perspektif standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Pada tahun 2016 telah diselenggarakan Penganugerahan SNI Award yang diikuti oleh 108 industri/organisasi berskala kecil, menengah dan besar. Tahapan seleksi SNI Award 2016 menghasilkan keputusan untuk memberi apresiasi kepada 40 industri/ organisasi terbagi dalam 4 (empat) kategori peringkat, yaitu: Platinum, Emas, Perak dan Perunggu.

Tabel 6: Target, Realisasi dan Capaian Indikator 4 Tahun 2016

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah penyelenggaraan penghargaan kepada industri /organisasi penerap SNI	2 kegiatan	2 kegiatan	100%

Kebijakan pengembangan sistem penerapan SNI dan penilaian kesesuaian diperlukan oleh *stakeholder* standardisasi sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penerapan standar dan penilaian kesesuaian. Dengan kebijakan-kebijakan yang disusun maka diharapkan kapasitas dan kualitas penerapan standar oleh *stakeholder* akan terus meningkat sehingga berdampak kepada semakin bertambahnya pelaku usaha dan organisasi yang menerapkan SNI.

Pada tahun 2016, PSPS menetapkan target penyusunan kebijakan pengembangan sistem penerapan SNI dan penilaian kesesuaian sebanyak 4 (empat) kebijakan. Sementara itu, dari target tersebut terdapat 2 (dua) kebijakan yang disiapkan dengan capaian realisasi 100%. yaitu:

1. Kebijakan standardisasi bidang penilaian kesesuaian tingkat internasional

Kebijakan standardisasi bidang penilaian kesesuaian tingkat internasional disusun melalui *Mirror Committee* CASCO, yang beranggotakan perwakilan pemerintah, lembaga penilaian kesesuaian serta pakar di bidang laboratorium, inspeksi, sertifikasi dan akreditasi yang bertugas memonitor perkembangan standar internasional di bidang penilaian kesesuaian, dan memberi tanggapan dari Indonesia terhadap draft Standar Internasional, terutama yang dikembangkan oleh CASCO, komite di ISO yang membahas isu internasional terkait penilaian kesesuaian.

Pada tahun 2016, MC CASCO telah menyusun 14 (Empat belas) kebijakan terhadap dokumen/*circular letter* ISO/CASCO, sehingga diharapkan kebijakan internasional di bidang CASCO dapat sesuai dengan kepentingan Indonesia dan mempermudah penerapannya di Indonesia.

2. Kebijakan standardisasi bidang kelistrikan di tingkat regional/ internasional

Kebijakan standardisasi bidang kelistrikan di tingkat regional disusun dalam rangka memfasilitasi pendaftaran LPK Indonesia dalam kerangka ASEAN EE MRA. Dengan diterimanya LPK Indonesia dalam lingkup ASEAN EE MRA, akan memudahkan keberterimaan produk elektronik yang akan diekspor ke wilayah ASEAN, sehingga dapat meningkatkan efisiensi bagi industri dalam melaksanakan penilaian kesesuaian.

Pada tahun 2015, Indonesia telah menyusun kebijakan pengusulan pendaftaran 4 (empat) LPK dan telah memberikan kontestasi terhadap 9 (sembilan) LPK ASEAN. Dengan demikian, LPK Indonesia yang terdaftar dalam kerangka ASEAN EE MRA terdiri dari 3 (tiga) laboratorium uji dan 2 (dua) Lembaga Sertifikasi Produk.

Sementara kebijakan standardisasi sektor kelistrikan di tingkat internasional disusun dalam rangka mempersiapkan lembaga yang mampu melakukan aktivitas penilaian

kesesuaian atas produk kelistrikan sebagai konsekuensi Indonesia telah menandatangani perjanjian *Joint Sectoral Committee* (JSC) bidang peralatan listrik dan elektronik Negara ASEAN.

Pada tahun 2015, telah ditetapkan verifikasi dilakukan terhadap NCB Balai Sertifikasi Industri dan *Customer Testing Facility* (CTF) PT. Hartono Istana Teknologi untuk ruang lingkup *Household* (HOUS) dan *Audio Video* (TRON) terkait persyaratan ISO/IEC 17025 dan *Basic Rule IECEE*. Selain itu, juga telah dilaksanakan penyamaan persepsi untuk produk mesin cuci.

Melalui kebijakan-kebijakan yang disusun tersebut maka kapasitas dan kualitas penerapan standar oleh stakeholder menjadi semakin bertambah. Stakeholder juga semakin banyak memiliki aturan dan acuan dalam menerapkan standar dan penilaian kesesuaian, yang akan berdampak kepada semakin bertambahnya pelaku usaha dan organisasi yang menerapkan SNI.

Capaian realisasi untuk indikator 5 tahun 2016 yaitu jumlah kebijakan pengembangan sistem penerapan SNI dan penilaian kesesuaian, dijelaskan pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7: Target, Realisasi dan Capaian Indikator 5 Tahun 2016

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah konsep kebijakan pengembangan sistem penerapan SNI dan penilaian kesesuaian yang disiapkan oleh Bidang PPSSJM	2 kebijakan	2 kebijakan	100%

Pencapaian realisasi untuk indikator 5 sebesar 100% pada tahun 2016 ini sama nilainya dengan capaian realisasi untuk indikator 5 pada tahun 2015.

Dalam melaksanakan kebijakan di bidang penerapan standar yang memiliki fungsi pelaksanaan sistem prasarana penerapan standar, perlu melakukan upaya untuk peningkatan kompetensi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) sebagai prasarana penerapan standar.

Untuk itu upaya pengembangan kemampuan LPK dalam rangka penerapan standar baik SNI, standar internasional maupun standar negara lain hendaknya dilakukan secara berkelanjutan yang mencakup peningkatan kemampuan sumber daya manusia/personel LPK dengan memberikan konsultasi dan pelatihan dalam bentuk workshop (pemahaman) dan bimbingan teknis.

Untuk mendukung penerapan SNI, maka diperlukan infrastruktur penilaian kesesuaian yaitu Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), baik laboratorium uji, lembaga inspeksi ataupun lembaga sertifikasi, yang akan memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan SNI.

Pada tahun 2016 direncanakan untuk melakukan pembimbingan sebanyak 5 LPK hingga siap di akreditasi dan direncanakan untuk peningkatan kompetensi dan pemahaman standar yang melibatkan 59 LPK. Namun pada triwulan I – 2016 Pemerintah RI mengeluarkan kebijakan efisiensi anggaran di hampir seluruh Kementerian/ Lembaga, yang menyebabkan perubahan rencana kegiatan dan berdampak pada menurunnya output kegiatan.

Dengan adanya efisiensi anggaran, maka kegiatan di optimalkan untuk membimbing 3 LPK hingga siap di akreditasi dan peningkatan kompetensi dan pemahaman 44 LPK, dengan uraian sebagai berikut :

- a) 3 (tiga) LPK yang mendapatkan pembinaan melalui pembimbingan penyusunan dokumentasi sistem mutu yaitu:
 - 2 (dua) Laboratorium Penguji berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2008 tentang Persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi, yaitu: Laboratorium Kesehatan Daerah, Tasikmalaya; dan Laboratorium Balai Pengembangan Teknologi dan Konstruksi, Kalimantan Selatan.
 - 1 (satu) Laboratorium Medik berdasarkan SNI ISO 15189:2012 tentang Laboratorium medik – Persyaratan mutu dan kompetensi, yaitu: Laboratorium Medik UPTK Keselamatan dan Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Timur.
- b) 44 (empat puluh empat) LPK yang mendapatkan pembinaan melalui peningkatan pemahaman terhadap standar dalam 3 (tiga) workshop yaitu:
 - 12 (sebelas) LPK peserta workshop pemahaman penerapan SNI ISO/IEC 17025:2008 di Mataram;
 - 15 (lima belas) LPK peserta workshop pemahaman penerapan SNI ISO 15189:2012 di Makassar;
 - 17 (tujuh belas) LPK peserta workshop pengembangan lembaga penilaian kesesuaian dalam rangka Penerapan SNI ISO/IEC 17065:2012 bagi Lembaga Sertifikasi produk di Manado.

Capaian realisasi untuk indikator 8 tahun 2016, yaitu Jumlah LPK yang mendapat fasilitasi untuk memperluas lingkup dan meningkatkan kompetensinya, dijelaskan pada Tabel 8.

Tabel 8: Target, Realisasi dan Capaian Indikator 8 Tahun 2016

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase jumlah LPK yang siap diakreditasi	3	3	100%

Dilihat dari sisi output tahun 2016 terjadi penurunan dari target 5 LPK menjadi 3 LPK, dan pembinaan LPK melalui pembimbingan menurun dari 59 LPK menjadi 44 LPK.

Meski demikian misi 2016 tetap tercapai 100% yaitu melakukan :

- pembimbingan penyusunan dokumentasi sistem mutu hingga 3 LPK siap di akreditasi.
- Peningkatan kompetensi dan pemahaman standar bagi 44 LPK

Pencapaian realisasi untuk indikator 8 untuk kumulatif tahun 2015-2016 dapat dicapai sebesar 44 %, sebagaimana dijelaskan pada Tabel 9 berikut.

Tabel 9: Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja 8 Tahun 2015-2016

Indikator kinerja	Target 2015-2016	Realisasi					Total
		2015	2016	2017	2018	2019	
Persentase jumlah LPK yang siap di akreditasi	52%	42%	44%	-	-	-	44% (84% dari target)

Pencapaian realisasi untuk indikator 8 sebesar 44% pada tahun 2016 ini tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu 52% disebabkan beberapa faktor, yaitu : adanya kebijakan pemerintah terkait penghematan dan efisiensi anggaran TA 2016 sehingga kegiatan pembimbingan LPK yang awalnya direncanakan untuk 5 LPK harus berkurang menjadi 3 LPK yang dibimbing untuk siap di akreditasi. Selain itu, pada tahun 2016 terdapat 44 LPK dari target semula 59 LPK yang diberikan pembinaan untuk peningkatan pemahaman terhadap standar dan penguatan kompetensi LPK.

Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Sumber daya manusia merupakan aset dalam segala aspek pengelolaan terutama yang menyangkut eksistensi perusahaan atau organisasi tersebut.

Keberadaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi merupakan aset yang berharga bagi organisasi itu sendiri, tak terkecuali BSN. Keberhasilan BSN ditentukan dari kualitas orang-orang yang berada di dalamnya. SDM akan bekerja secara optimal jika organisasi dapat mendukung kemajuan karir mereka dengan melihat apa sebenarnya kompetensi mereka. Pengembangan SDM berbasis kompetensi akan mempertinggi produktivitas karyawan sehingga kualitas kerja pun lebih tinggi pula dan berujung pada tercapainya target produksi dan kepuasan Stakeholder.

Pengembangan SDM berbasis kompetensi dilakukan agar dapat memberikan hasil sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Kompetensi yang dimiliki seorang karyawan secara individual harus dapat mendukung pelaksanaan visi misi BSN melalui kinerja strategis dan sinergis antar manusia di dalamnya. Oleh karena itu kinerja individu dalam organisasi merupakan jalan dalam meningkatkan produktivitas BSN.

Pada tahun 2015 dan 2016 dari segi jumlah pegawai di bidang PPSSJM tidak mengalami perubahan yaitu berjumlah 15 orang.

Pada tahun 2016 Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu (PPSSJM) telah melaksanakan capacity building dalam rangka meningkatkan pemahaman standar, penyamaan persepsi SNI dan berbagai kegiatan sharing knowledge dalam bentuk workshop pemahaman standar bidang Elektronika yang diikuti oleh 30 peserta yang merupakan pegawai di lingkungan PSPS maupun Pusat/Biro lain di lingkungan BSN. Selain itu juga dilaksanakan pemahaman SNI ISO 9001:2015 untuk 15 staf di lingkungan Bidang PPSSJM.

Tabel 10: Target, Realisasi dan Capaian Indikator 9 Tahun 2016

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) PSPS yang meningkat kompetensinya	100%	100%	100%

Tabel 11: Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja 9 Tahun 2015-2016

Indikator kinerja	Target 2015-2016	Realisasi					
		2015	2016	2017	2018	2019	Total
Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) PSPS yang meningkat kompetensinya	100%	100%	100%	-	-	-	100% (100% dari target)

B. REALISASI ANGGARAN

Seluruh kegiatan PPSSJM pada Tahun 2016 dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana diuraikan di atas dilaksanakan menggunakan anggaran DIPA BSN Nomor SP DIPA-084.01.0/AG/2015 tanggal 5 Desember 2015, dengan realisasi anggaran Rp. 2.334.933.417,- atau 98.01% dari pagu anggaran PPSSJM BSN sebesar Rp. 2.382.261.000,-

Bab 4

Penutup

Melalui Laporan Kinerja Bidang PPSSJM tahun 2016 ini telah disusun laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan Bidang PPSSJM - PSPS. Sasaran strategis PSPS tahun 2016 difokuskan pada meningkatnya kapasitas dan kualitas penerapan standar, sasaran strategis tersebut telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pusat Sistem Penerapan Standar Tahun 2016.

Laporan Kinerja Bidang PPSSJM Tahun 2016 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja PSPS di masa mendatang, melalui pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih optimal.

	pengaduan dalam penerapan standar	
	9 Persentase jumlah LPK yang siap diakreditasi	52% %
Learning and Growth Perspectives		
3 Meningkatkan kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi PSPS yang	10 Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) PSPS yang meningkat kompetensinya	100 %
	11 Realisasi anggaran PSPS	≥95 %

ampiran

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
KEPALA PUSAT SISTEM PENERAPAN STANDAR
BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Customer Perspectives		
1 Meningkatkan penerapan SNI oleh pemangku kepentingan	1 Jumlah SNI yang diadopsi menjadi regulasi teknis (kumulatif)	203 SNI
	2 Jumlah SNI yang diterapkan sukarela oleh pelaku usaha/organisasi	161 SNI
Internal Process Perspectives		
2 Meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian	3 Persentase jumlah industri/organisasi yang siap disertifikasi dari jumlah industri yang difasilitasi	14% %
	4 Jumlah penyelenggaraan penghargaan kepada industri/organisasi penerap SNI	2 kegiatan
	6 Jumlah kebijakan penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian	8 kebijakan
	7 Jumlah jenis produk yang dimonitor penerapannya	10 jenis produk
	8 Persentase penyelesaian penanganan pengaduan dalam penerapan standar	100 %
	9 Persentase jumlah LPK yang siap diakreditasi	52% %
Learning and Growth Perspectives		
3 Meningkatkan kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi PSPS yang profesional	10 Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) PSPS yang meningkat kompetensinya	100 %
	11 Realisasi anggaran PSPS	≥95 %
	12 Jumlah <i>e-governance</i> yang mendukung tata kelola PSPS	4 Aplikasi

Kegiatan
Peningkatan Penerapan Standar

Anggaran (Rp)
9.431.498.000

Pihak Kedua

Jakarta, Maret 2016
Pihak Pertama

Kukuh S. Achmad

Zakiyah

The image features a stylized map of Indonesia in shades of blue and green at the top right. The background is composed of large, interlocking puzzle pieces in various shades of blue. A white, abstract line graphic resembling a stylized 'S' or a path is overlaid on the puzzle pieces.

**Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu
Pusat Sistem Penerapan Standar**



Badan Standardisasi Nasional

